

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

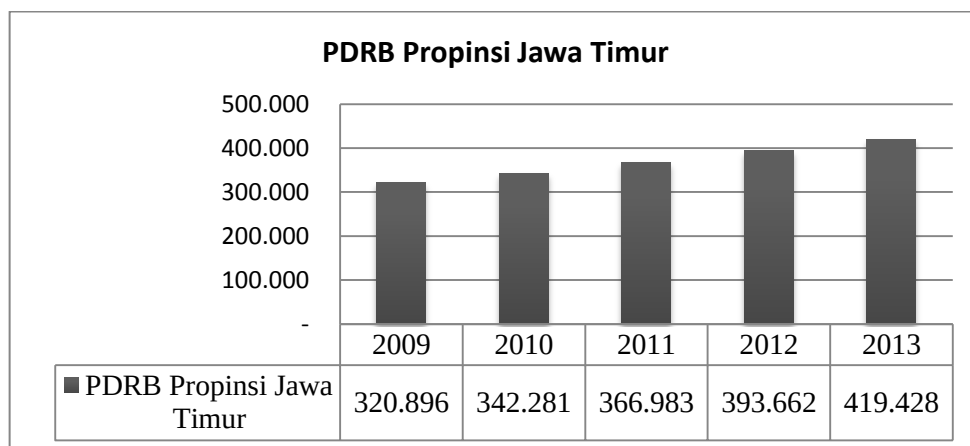
Tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai keseimbangan perekonomian internal maupun eksternal. Keseimbangan internal adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya kestabilan harga-harga serta terjadinya tingkat pengerjaan yang optimal. Sedangkan keseimbangan eksternal adalah keseimbangan dalam neraca luar negeri baik neraca pembayaran maupun neraca perdagangan. "Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000)".

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatkan produksi maka sangat membutuhkan biaya produksi yang cukup tinggi pula, membutuhkan pekerja dalam jumlah tinggi pula. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Akan tetapi pada realitanya sangat berbeda, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan produksinya namun tidak mampu membayar para tenaga kerja dalam jumlah banyak, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Akan tetapi tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada level tinggi dan tidak terlalu terpengaruh akan modal untuk membayar para tenaga kerja mereka, jadi tidak ada

permasalahan jika terus meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk meningkatkan pula produksi mereka. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya PDRB di Jawa Timur seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

PDRB Jatim ADHK 2000 Tahun 2009-2013 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan grafik kenaikan PDRB Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2013. PDRB merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dari grafik PDRB diatas tentunya kita tahu bahwa produksi semakin meningkat, namun apakah hal itu menjamin naiknya penyerapan tenaga kerja pula?.

Selama proses pembangunan ekonomi berlangsung diperlukan adanya sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta tidak lupa pula teknologi. Pengembangan sumber daya manusia sebagai unsur pendukung utama dalam proses pembangunan. Peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak perlu diragukan lagi, karena titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap

kualitas dan kuantitas produksi dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (teori *Human Capital*) yang nantinya akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Rata-rata lama sekolah merupakan perwakilan dimana berapa lama seseorang pernah bersekolah secara formal. Sehingga hal itu menjadi patokan seberapa berkualitas seseorang tersebut untuk menjadi tenaga kerja. Pendidikan saat ini menjadi hal yang penting dalam memasuki lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja mampu mendorong produktifitas, yang mana nantinya akan semakin banyak kebutuhan akan tenaga kerja. Namun bukan hanya hal itu yang mempengaruhi, akan tetapi sistem pengupahan yang baik dan nilai yang sesuai juga sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada umumnya dan buruh pada khususnya. Dibanding dengan tenaga kerja kalangan atas, buruhlah yang biasanya lebih terkena dampak dari kenaikan upah minimum. Upah minimum sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan para tenaga kerja. Upah yang layak akan menaikkan pendapatan pekerja, kenaikan pendapatan akan menaikkan daya beli pekerja, kenaikan daya beli pada gilirannya akan menaikkan permintaan efektif (Maimun, 2005).

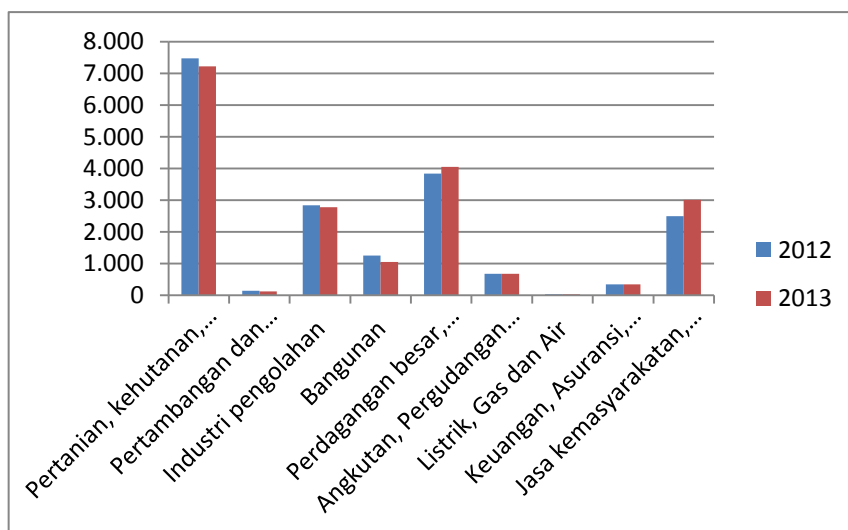
Namun pada kenyataannya upah minimum ini berimbas pada tenaga kerja kalangan bawah seperti buruh yang sering kali terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak untuk mengurangi biaya produksi, sehingga menambah jumlah pengangguran dan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dalam tulisan ini buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan. Dan dalam kenyataannya tidak semua industri pengolahan membayar buruhnya sesuai dengan UMK, namun yang terjadi adalah upah sesuai dengan kemampuan

industri tersebut. Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kerja setelah dikurangi dengan potongan-potongan seperti iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Jadi UMK memang menjadi patokan pengupahan, namun upah bersihlah yang sebenarnya diterima oleh para buruh.

Buruh dalam pandangan masyarakat luas saat ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada bidang industri pengolahan atau disebut *manufacturing industry*. Dari dasar inilah peneliti mengambil kesimpulan bahwa tenaga kerja di bidang industri pengolahan kami sebut buruh. Dibawah ini adalah tabel jumlah buruh (tenaga kerja industri pengolahan) di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 2013.

Gambar 1.2

Tenaga Kerja Lapangan Pekerjaan Utama Jawa Timur 2012-2013 (Orang)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Dari gambar 1.2 diatas kita bisa melihat bahwa tenaga kerja sektor industry menduduki peringkat ketiga setelah pertanian dan perdagangan besar. Namun dalam penelitian ini tenaga kerja pada sektor industri menjadi variable penelitian dikarenakan tenaga kerja industri pengolahan memiliki masalah yang cukup

komplek didalam negeri dibanding dengan sektor pertanian dan perdagangan besar jika melihat dari realita yang ada selama ini. Dan dari gambar 1.2 diatas kita bisa melihat bahwa jumlah menurun pada tahun 2013 dibanding dengan tahun 2012 di Provinsi Jawa Timur. Itu menandakan bahwa penyerapan buruh di Provinsi Jawa Timur ini semakin menurun. Dan tenaga kerja Buruh adalah yang paling rentan terkena imbas dari kenaikan upah. Karena banyak sekali Buruh yang diPHK secara besar-besaran karena imbas dari naiknya biaya yang harus dibayar kepada buruh dan para perusahaan industri pengolahan terpaksa melakukan pengurangan biaya produksi dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. UMK adalah upah minimum yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja, namun UMK merupakan upah yang terkesan dipaksakan. UMK merupakan patokan sistem pengupahan di Indonesia, namun sekali lagi perlu diingat bahwa yang diterima oleh buruh adalah upah bersih.

Pengaturan pengupahan utamanya harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja agar dapat terpenuhi karena dari waktu ke waktu senantiasa meningkat, serta memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, penetapan upah minimum dan kenaikan upah minimum perlu dilakukan dan dikaji secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaatnya. Kenaikan upah yang terlalu drastis akan merugikan perusahaan. Sebaliknya kenaikan upah yang terlalu datar tidak menguntungkan pekerja/buruh, karena kenaikan tersebut akan kalah oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan kesejahteraan pekerja/buruh tidak akan tercapai. Oleh karena itu kenaikan Upah Minimum perlu diketahui dan disetujui oleh semua pihak (Devi, 2011).

Secara konseptual, tingkat upah mencerminkan tingkat produktifitas tenaga kerja yang telah disumbangkan tenaga kerja yang bersangkutan kepada

perusahaan, sehingga dengan naiknya upah diharapkan tingkat produktifitas tenaga kerja juga naik, dan selanjutnya akan menaikkan output perusahaan tersebut. Namun pada realitanya upah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Apabila upah naik maka permintaan akan tenaga kerja akan turun, meski penawaran tenaga kerja menjadi naik namun permintaan tenaga kerja terbatas untuk penawaran tenaga kerja.

Dari sisi pekerja, upah adalah salah satu sarana untuk menaikkan kesejahteraan diri dan keluarga secara langsung, karena pendapatan nominal mengalami kenaikan. Sehingga upah bila di lihat dari sisi penawaran tenaga kerja akan berakibat positif bagi peningkatan produksi. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh kenaikan produktivitas pekerja pada hampir semua sektor. Secara makro, agregasi dari kenaikan produksi masing-masing sektor akan menaikkan PDB untuk negara ataupun PDRB untuk daerah. Di sisi lain, kenaikan upah secara umum akan mengurangi *aggregate employment* (jumlah tenaga kerja). Ini berarti kenaikan upah dapat berdampak terhadap tenaga kerja.

Gambaran aspek pengupahan di atas menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian baik regional maupun nasional. Dampak langsung bagi pekerja adalah naiknya pendapatan pekerja, sedangkan dampak langsung bagi pengusaha adalah naiknya biaya produksi namun diikuti pula penyerapan tenaga kerja yang semakin sedikit karena banyak industri yang melakukan PHK para buruh untuk mengurangi biaya produksi serta mengurangi permintaan tenaga kerja agar biaya produksi juga menurun. Dampak tidak langsung tingkat mikro berupa perubahan tingkat output, harga produk, harga input dan lain-lain, sedangkan dampak tidak langsung tingkat makro berupa perubahan PDB atau

PDRB, konsumsi, investasi, inflasi, *employment*, pemerataan dan indikator-indikator makro lainnya. Dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan aktivitas sebuah sektor akan sangat mempengaruhi aktivitas sektor lainnya, karena suatu sektor dalam perekonomian tidak terlepas dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, sehingga kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut akan berimbas pada perekonomian secara makro (Maimun, 2005).

Namun perlu diingat bahwa upah nominal tidak menggambarkan tingginya tingkat daya beli seorang pekerja, namun upah riil lah yang menjadi ukuran dalam melihat kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhannya. Meski upah nominal naik belum tentu upah riil naik dan tingkat daya beli juga naik karena nilai dari suatu barang akan terus naik seiring perkembangan ekonomi. Jadi kenaikan upah riil lah yang mempengaruhi daya beli para buruh. Upah riil naik, daya beli naik, permintaan akan barang dan jasa naik, produksipun meningkat diharapkan pula penyerapan tenaga kerja meningkat. Namun sekali lagi hal itu masih jauh dari harapan. Dikarenakan jumlah lapangan kerja masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan buruh. Begitu pula rata-rata lama sekolah merupakan modal bagi tenaga kerja agar terserap oleh lapangan pekerjaan. Upah riil juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi upah riil, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli dan produksi barang dan jasa, dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan tenaga kerja yang ditawarkan akan terserap. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dan

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Upah Riil Terhadap Penyerapan Buruh Di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan Buruh di Jawa Timur?
2. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan Buruh di Jawa Timur?
3. Apakah Upah Riil berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan Buruh di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penyerapan buruh (tenaga kerja industri pengolahan) di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan buruh (tenaga kerja industri pengolahan) di Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Riil terhadap penyerapan buruh (tenaga kerja industri pengolahan) di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat jika dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemikiran atau bahan informasi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, upah riil dan tenaga kerja khususnya buruh di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan sistem pengupahan, kebijakan mengenai pendidikan dan menentukan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan demi semakin naiknya penyerapan tenaga kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membicarakan tentang rancangan dari penelitian ini yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang diambil data penelitian yang akan dikemukakan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi daerah dan objek data, hasil analisis data, dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan keterbatasan pada penelitian ini serta beberapa saran yang membangun pihak-pihak terkait dalam masalah ketimpangan pendapatan antar daerah.